

SEJARAH SOSIAL ARAB-ISLAM PADA ABAD VIII DAN IX M (Studi tentang Pranata Sosial Era Abbasiyah)

Al Husaini M. Daud

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh
Lhokseumawe Aceh
beck_roprophai@yahoo.com

Abstract

The acceleration of the Islamic power expansion in the Abbasid dynasty era is a description of the highest civilization of the Muslims who comprehensively embodied the teachings of Islam in total (kāffah) and universal way. Historical facts reveal that the Abbasid dynasty, with its great imperium, has given to the contemporary world of generation an unparalleled contribution, not only in terms of state management method, the setting system of society, and sciences in various lines of life, but also his contribution to the progress in the field of social order that include educational institutions, agriculture, trade and industry, politics, and military fields. This article is trying to unravel aspects of Arab-Islamic social order which is the other side of social history of the Middle East. Some of the things discussed is how the actual relationship between central and local interconnected at this time and how well the condition of social institutions and order built in the everyday reality of people living in the Islamic empire, including social institutions in education, agriculture, commerce and industry, politics, and the military.

Abstrak

Akselerasi ekspansi pemerintahan Islam era Dinasti Abbasiyah merupakan deskripsi peradaban tertinggi umat Islam yang secara komprehensif mengejawantahkan ajaran Islam secara *kāffah* dan universal. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa Dinasti Abbasiyah dengan imperium besarnya telah memberikan kontribusi yang tiada tara kepada generasi dunia kekinian, bukan saja dalam hal metode pengelolaan negara, pengaturan sistem kemasyarakatan,

dan ilmu pengetahuan dalam berbagai lini kehidupan; tetapi juga sumbangsuhnya terhadap kemajuan di bidang pranata sosial yang meliputi pranata pendidikan, pertanian, perdagangan dan perindustrian, politik, dan bidang kemiliteran. Artikel ini berusaha mengurai aspek pranata sosial Arab-Islam yang merupakan sisi lain dari sejarah sosial Timur Tengah. Beberapa hal yang dibahas adalah bagaimana sebenarnya hubungan interkoneksi antara pusat dengan daerah pada masa ini dan bagaimana pula kondisi pranata sosial yang dibangun dalam realitas keseharian masyarakat yang hidup dalam wilayah imperium Islam ini, meliputi pranata sosial di bidang pendidikan, pertanian, perdagangan dan industri, politik, dan militer.

Kata Kunci: Abbasiyah, pranata sosial, *mawāfī*, struktur masyarakat.

A. Pendahuluan

Tinta emas kegemilangan Islam yang tercatat dalam literatur sejarah mencapai puncaknya pada akhir abad VIII M, ketika babak ketiga drama besar politik Islam dibuka dengan peran penting yang dimainkan oleh Abu al-‘Abbās as-Saffāh (750–754 M) dan Irak menjadi pentas panggung drama besar tersebut. Dia menjadi pendiri Dinasti Arab-Islam ketiga setelah al-Khulafā’ ar-Rāsyidūn dan Dinasti Umayyah. Philip K. Hitti mengatakan bahwa pasca keberhasilan merebut kekuasaan, orang-orang Abbasiyah mengklaim dirinya sebagai pengusung konsep sejati kekhalifahan, yaitu gagasan negara teokrasi.¹

Perbedaannya dengan dinasti sebelumnya, yakni Dinasti Umayyah, yang sangat kentara antara lain adalah: (1) Pemerintahan Abbasiyah adalah pemerintahan non-Arab, sedangkan zaman Umayyah adalah Arab murni yang sangat peka terhadap suku Arab. Pada periode Abbasiyah, elite tentara yang terdiri dari orang Arab, orang Khurasan dan dari daerah-daerah lain sangat menonjol dalam pengambilan kebijakan pemerintah. (2) Pengaruh Arab pada era Dinasti Umayyah secara berangsur-angsur luntur dan diskriminasi Arab atas *mawāfī* secara perlahan-lahan hilang ketika Dinasti Abbasiyah berdiri.² (3) Hubungan pusat dengan daerah pada

¹ Philip K. Hitti, *History of the Arabs: from the Earliest Times to the Present*. terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 358.

² M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), h. 180.

masa Umayyah bersifat sentralistik-otoriteristik, sedangkan pada masa Abbasiyah bersifat disentralistik. (4) Nuansa Arabisasi pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah sangat kentara, sedangkan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah nuansa islamisasi sangat menonjol. (5) Gelar khalifah pada masa pemerintahan Umayyah merupakan pengganti khalifah sebelumnya (wakil Khalifah); sedangkan pada masa pemerintahan Abbasiyah, selain Abū al-‘Abbās as-Saffāh, sejak Khalifah al-Manṣūr bertahta gelar tersebut berubah menjadi *Khalīfatullāh* (wakil Allah). Mereka tidak tergantung sumpah setia dan pengakuan dari rakyat sebagai legitimasi kekuasaan.³

Era kekhalifahan Abbasiyah terutama ketika kekuasaan dikelola oleh tujuh khalifah sesudah as-Saffāh dan al-Manṣūr, yaitu al-Mahdi (775-785 M), al-Hādi (775- 786 M), Hārūn ar-Rasyīd (786-809 M), al-Ma’mūn (813-833 M), al-Mu’taṣīm (833-842 M), al-Waṣīq (842-847 M), dan al-Mutawakkil (847-861 M), Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Sejarawan sering menyebut era ini sebagai *The golden age* imperium Islam dalam rentang abad VIII dan IX M sekaligus merupakan deskripsi peradaban tertinggi umat Islam yang secara komprehensif mengejawantahkan ajaran Islam secara kāffah dan universal. D. Sourdél, melalui kumpulan tulisannya dalam *The Cambridge History of Islam* mengatakan bahwa *The Abbasid caliph was nevertheless one of the most powerful prices reigning at this period.*⁴ Berbagai unsur kebudayaan dan peradaban diikat oleh satu nafas, yaitu ajaran Islam yang memberikan semangat dan motivasi untuk saling mengenal dari berbagai perbedaan suku dan bangsa, akhirnya melahirkan perkembangan ilmu dan kebudayaan.⁵ Tatahan sosial kemasyarakatan diatur sesuai dengan syari’at sehingga keharmonisan antarwarga betul-betul terasa.

Pranata sosial kemasyarakatan yang berlandaskan syari’at Islam terus dipupuk dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui pencerahan yang dilakukan oleh para ilmuwan.

³ *Ibid.*

⁴ D. Sourdél, “The Abbasid Caliphate” dalam *The Cambridge History of Islam*, Vol. 2 (New York: Cambridge University Press, 1970), h. 118.

⁵ Mansur, *Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), h. 37.

Dukungan khalifah kepada perkembangan ilmu pengetahuan sangat tinggi dan cukup apresiatif, terutama bila menyangkut pengaturan tatanan kehidupan Islami bagi masyarakat. Kualitas stabilitas saat imperium ini berkuasa tampak jelas dirasakan oleh warganya, sehingga petani mampu merencanakan panennya, pengusaha dapat berinventasi dalam proyek-proyek jangka panjang, dan mendorong siswa untuk memasuki program studi panjang dengan keyakinan bahwa apa yang mereka pelajari akan bermanfaat saat mereka lulus. Stabilitas memberikan ruang kebebasan kepada sarjana untuk membenamkan diri mereka dalam studi dan menggali jauh ke dalam misteri alam tanpa harus khawatir bahwa keluarga mereka sementara itu akan dibantai oleh kaum penjahat. Akselerasi ekspansi pemerintahan Islam membawa banyak etnik yang berada di bawah panji Islam. Karena itu, perlu membuat janji persaudaraan dan kesetaraan muslim berlaku untuk semua golongan.

Tulisan ini mendeskripsikan tentang pranata sosial di era kekhalifahan Abbasiyah terutama hal yang berkaitan dengan pranata bidang pendidikan, pertanian, perdagangan dan perindustrian, politik, dan kemiliteran. Sejauh penelusuran penulis, studi mengenai hal ini masih sangat kurang dan hanya berupa paparan sekilas dan kupasan global namun masih sangat datar dan tidak terfokus pembahasannya.

Ira. M. Lapidus dalam magnum opusnya *Sejarah Sosial Ummat Islam*, hanya mengilustrasikan tentang bagaimana Islam di Timur Tengah, Asia Tengah dan Selatan diinterpretasikan umat Islam, sehingga dapat berdialog dengan situasi kesejahteraan umat Islam dan menghargai keanekaragaman karakter bangsa-bangsa yang memeluk Islam. Sementara itu, Akh. Minhaji dalam bukunya *Sejarah Sosial dalam Studi Islam* hanya menjelaskan mengenai arti sejarah sosial, latar belakang munculnya, hubungannya dengan sejarah lainnya, di samping juga teori dan metodologi. Namun karya ini hampir tidak menyentuh perihal pranata sosial di kalangan umat Islam.

Phillip K. Hitti menulis tentang soal ini dalam bukunya *History of the Arabs* dan *Short History of The Arabs* (ringkasan dari *History of The Arabs* yang terbit pertama kali tahun 1960). Karya pertama bahasanya masih terkesan kronologikal, yakni

menceritakan tentang kemunculan Islam dan perkembangannya hingga Abad Pertengahan, gerak penaklukan, dan zaman keemasan serta era kejatuhannya. Walaupun Hitti tidak merasa puas dengan sekadar menyajikan data-data historis seputar pergantian penguasa yang berlangsung di dunia Arab-Islam, sehingga ia melacak lebih jauh lagi pada kondisi prasejarah bangsa Arab, termasuk kondisi geologi dan geografinya; namun karya tersebut tidak membahas secara komprehensif mengenai pranata sosial yang terjadi sekitar abad VIII dan IX M bahkan pengungkapannya tentang alur pikir sejarah masih terkesan sangat diakronik. Begitupun pada karya kedua yang merupakan ringkasan dari karya pertamanya. Dalam buku ini secara umum Hitti membahas mengenai kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Arab, khususnya kaum Badwi sejak masa pra-Islam atau 2000 tahun sebelum Yesus lahir hingga masa berjayanya Islam di masa Dinasti Umayyah, serta pengaruh Muhammad dan Al-Qur'an dalam perkembangan Islam sebagai suatu peradaban yang besar; namun lagi-lagi studi pranata sosial secara komprehensif dan mendalam yang ada pada komunitas masyarakat Arab-Islam terlewatkan.

Meskipun pembahasan tentang sejarah sosial era kekhalifahan Abbasiyah secara luas disinggung dalam tulisan-tulisan atau artikel-artikel sejarah sebagaimana pada karya di atas, namun mayoritas masih belum banyak menyentuh aspek pranata sosial yang menjadi khazanah penting untuk diungkapkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sejarah peradaban Islam. Tulisan ini memaparkan sisi lain dari sejarah sosial Arab-Islam, yakni aspek pranata sosial pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah abad VIII dan abad IX M. Beberapa hal yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana sebenarnya hubungan interkoneksi antara pusat dengan daerah pada masa ini dan bagaimana pula kondisi pranata sosial yang dibangun dalam realitas keseharian masyarakat yang hidup dalam wilayah imperium Islam ketiga ini.

B. Definisi Pranata Sosial

Pranata Sosial merupakan sistem hubungan sosial yang terorganisir dengan mengejawantahkan nilai-nilai dan prosedur umum dalam mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga

masyarakat. Ia berbeda dengan pengertian institut (lembaga) walau sering dipadankan dengan kata *institution* (pranata). Lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakannya.

Koenjtaraningrat mengemukakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem norma khusus yang menata serangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat.⁶ Karenanya, masih menurut Koenjtaraningrat, berbicara tentang pranata sosial, ada tiga kata kunci yang selalau menyertainya: (1) Nilai dan norma; (2) Pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut prosedur umum; dan (3) Sistem hubungan, yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku. Lebih lanjut Koentjaraningrat mengatakan, bahwa pranata sosial adalah sesuatu yang bersifat konsepsional dan bukan bersifat empirik. Artinya, eksistensinya hanya dapat ditangkap dan dipahami melalui sarana pikir, dan hanya dapat dibayangkan dalam imajinasi sebagai suatu konsep atau konstruksi pikir.⁷

Sumarsono dan Ahmad Fuad Zain menyebutkan, pranata sosial adalah suatu sistem perilaku yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas pemenuhan berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan, menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat, dan menyediakan nilai-nilai pengendalian sosial.⁸ Sedangkan Horton dan Hunt mendefinikan pranata sosial sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting.⁹ Ciri-cirinya adalah: (1) Pranata sosial terdiri dari seperangkat organisasi daripada pemikiran-pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan; (2) Pranata sosial itu relatif mempunyai tingkat kekekalan tertentu;

⁶ Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*, Jilid. I, cet. ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 133.

⁷ *Ibid.*, h. 135.

⁸ Sumarsono dan Ahmad Fuad Zain, *Pendidikan sebagai Pranata Sosial*, <http://www.scribd.com/doc/39638126>. (Diakses 14 Oktober 2011).

⁹ Paul B. Horton dan Chester L Hunt, *Sosiologi*, jilid. I (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 86.

(3) Pranata sosial itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan; (4) Pranata sosial merupakan alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya; (5). Pranata sosial itu mempunyai dokumen, baik yang tertulis maupun tidak.¹⁰

Selain itu, secara umum pranata sosial memiliki fungsi *manifest* (nyata) dan fungsi *latent* (terselubung). Fungsi *manifest* merupakan fungsi pranata sosial yang nyata, tampak, disadari, dan menjadi harapan sebagian besar anggota masyarakat, seperti dalam pranata keluarga berfungsi reproduksi yaitu mengatur hubungan seksual untuk dapat melahirkan keturunan. Sedangkan fungsi *latent* adalah fungsi pranata sosial yang tidak tampak, tidak disadari dan tidak diharapkan orang banyak, tetapi ada; seperti dalam pranata keluarga mempunyai fungsi laten dalam pewarisan gelar atau sebagai pengendali sosial dari perilaku menyimpang.¹¹

C. Hubungan Interkoneksi antara Pusat dan Daerah

Pasca peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, perubahan sangat drastis pun terjadi. Tatanan kota dibentuk dengan arsitektur demikian rupa, lebih-lebih saat al-Manşūr, pengganti as-Saffāh membangun ibu kota baru dengan posisi cukup strategis di antara sungai Tigris dan sungai Eufrat yang selesai pada tahun 765 M (143 H) dan diberi nama Baghdad. Dalam rentang waktu dua puluh tahun, kota Baghdad terukir indah dalam lempengan sejarah dunia sebagai kota terbesar di dunia dan mungkin kota terbesar yang pernah ada dengan jumlah penduduknya, menurut Tertius Chandler sebagaimana dikutip oleh Tamim Ansary, hampir mencapai satu juta jiwa.¹²

Strata sosial yang pernah dirajut pada era Dinasti Umayyah cenderung diskriminatif, di mana elit keturunan Arab sangat dominan dalam *trah* kekuasaan Islam saat itu. Umayyah menciptakan lembaga-lembaga formal yang dalam prakteknya justeru membuat jarak antara berbagai tingkatan masyarakat

¹⁰<http://id.shvoong.com/social-sciences/1999582-pranata-sosial/ixzzljPEwqA7J>. (Diakses 14 Oktober 2011).

¹¹<http://www.scribd.com/doc/39638126/Pendidikan-Sebagai-Pranata-Sosial>. (Diakses 14 Oktober 2011)

¹² Tamin Ansary. *Destiny Disrupted, A History of The World Through Islamic Eyes*, terj. Yuliani Liputo (Jakarta: Zaman, 2010), h.159.

dan mendesain kerangka tersebut dalam lapisan-lapisan yang merugikan kelas sosial bawah. Muslim berdarah murni Arab berada di lapisan atas. Di bawah mereka adalah muslim dengan satu orang tua keturunan Arab dan satu orang tua berketurunan non-Arab; muslim non-Arab; selanjutnya muslim non-Arab dengan salah satu orang tua non-muslim; kemudian non-muslim yang setidaknya merupakan salah satu agama monoteistik dan seterusnya; sampai ke peringkat terendah dari yang rendah, kaum musyrik yang lahir dari orang tua musyrik, di mana mereka hampir tidak memiliki hak-hak hukum sama sekali.¹³

Realitas di atas berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah. Konsep kesukuan yang dibungkus dengan program Arabisasi diganti dengan konsep islamisasi yang tidak melihat pada etnik dan kesukuan. Struktur pemerintahan tidak hanya diisi oleh orang-orang Arab, melainkan juga oleh bangsa non-Arab, bahkan dari golongan non-muslim (Yahudi dan Nasrani), terutama pada pos-pos bagian keuangan dan administrasi negara. Pergaulan keseharian mereka juga menggunakan bahasa asli mereka dan tidak dipaksakan menggunakan bahasa Arab. Tidak hanya itu saja, orang-orang non-muslim pada masa kekhalifahan ini pada umumnya pun menikmati kebebasan beragama.

Dalam beberapa literatur sejarah hubungan antarstrata diungkapkan perkembangannya sangat fluktuatif. Tidak pada semua periode kekhalifahan Abbasiyah hubungan itu berlangsung secara harmonis; tetapi sangat tergantung pada siapa yang memimpin era kekhalifahan itu. Hubungan berbagai kelas, khususnya kelas rakyat di pelosok daerah dengan kelas penguasa di pusat kerajaan mencapai puncak keharmonisannya pada masa Hārūn ar-Rasyīd menjabat sebagai khalifah. Ia sangat terkenal dengan sifat kedermawanan dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat sehingga ia sering mengontrol rakyat dengan menyamar sebagai rakyat jelata, agar dapat mendengar langsung keluhan dan masalah mereka untuk kemudian mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu mereka.¹⁴ Dalam versi lain dikisahkan bahwa yang menyamar tersebut bukanlah khalifah, tetapi mata-

¹³ *Ibid.*, h. 148.

¹⁴ *Ibid.*, h. 161.

mata khalifah yang pergi berkeliling di antara rakyat biasa di desa-desa dengan menyamar menjadi pengemis. Hal itu dilakukan bukan hanya untuk mencari masalah yang akan diluruskan, melainkan juga untuk menetralkan orang-orang yang tidak puas dengan perilaku elite kerajaan. Karen Armstrong menambahkan bahwa salah satu kelebihan di masa kekuasaan Hārūn ar-Rasyīd ialah rakyat dapat menjalani hidup normal tanpa gangguan.¹⁵

Kondisi seperti ini kemungkinan besar karena sifat khalifah sendiri yang cinta rakyat dan juga karena kesalehan sosialnya yang sudah terpatri sejak didikan masa kecil. Dia memanfaatkan kekayaannya untuk keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikan. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya, lebih-lebih lagi dengan adanya lembaga keilmuan, yaitu *Bait al-Hikmah*.

Sejumlah besar halaman dalam catatan sejarah Arab menjelaskan bahwa di era lima Khalifah pertama Dinasti Abbasiyah, masyarakat merupakan komunitas muslim semua bangsa. Umat Islam saat itu merasakan benar-benar kedamaian dan ketenteraman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat; bahkan bukan hanya umat Islam, orang-orang *zimmī* (Kristen dan Yahudi—selanjutnya juga penganut Zoroaster dan Šabi'īn) juga merasakan percikan keagungan harmonisasi tersebut. Arnold Toynbee dalam bukunya *Sejarah Umat Manusia: Uraian Analitis, Kronologis, Narasi dan Komparatif* mengungkapkan bahwa masyarakat Islam (*ummah*) bersifat umum. Ia bisa mencakup semua penduduk negara Islam dan bahkan seluruh umat manusia.¹⁶

Kehidupan sosial masyarakat kebanyakan pada masa itu berada pada tingkat pergaulan yang sama, tidak ada perbedaan antara darah Arab dan non-Arab, klan merdeka, dan para budak, serta kaum bangsawan dan rakyat jelata. Begitupun antara kaum

¹⁵ Karen Armstrong, *Islam: a Short History*, terj. Ahmad Mustofa. (Yogyakarta: El-Banin Media, 2008). h. 74.

¹⁶ Arnold Toynbee, *Sejarah Umat Manusia: Uraian Analitis, Kronologis, Narasi, dan Komparasi*. terj. Agung Prihantoro, dkk. cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 509.

pria dan kaum wanita sama-sama mendapat posisi di tengah-tengah masyarakat. Lembaran dawai sejarah melukiskan betapa hampir seluruh khalifah yang memimpin khilafah ini terlahir dari rahim perempuan non-Arab dan kandungan budak perempuan.¹⁷ Dalam buku Philip K. Hitti dinyatakan bahwa ibu al-Manṣūr tidak lain adalah seorang budak Berber. Ibunda al-Ma'mūn merupakan budak perempuan Persia; ibu al-Wāṣiq dan al-Muqtadi berasal dari budak Yunani; al-Muntaṣir terlahir dari rahim budak perempuan asal Yunani-Abissinia; ibu al-Musta'in adalah seorang Slavia; dan ibu Muktaf dan al-Muqtadir merupakan budak dari Turki. Hārūn ar-Rasyīd, sang kreator puncak kejayaan Dinasti Abbasiyah, juga beribukan seorang budak yang dikenal dengan nama al-Khaizurān; perempuan pertama yang memiliki pengaruh penting dalam urusan administrasi kenegaraan dinasti ini.¹⁸

Namun, ketika kekuasaan berada di pangkuan Abū Muhammad Musā al-Amīn, harmonisasi interaksi antargolongan masyarakat, terutama relasi pusat dengan daerah mulai renggang, terutama antara keluarga khalifah di istana dengan kaum jelata di pedesaan, belum lagi hubungan mereka dengan para budak sangat jauh perbedaannya. Philip K. Hitti melukiskan bahwa posisi teratas dalam tingkatan sosial ditempati oleh khalifah dan keluarganya, para pejabat pemerintah, keturunan Bani Hasyim, dan orang di sekitar mereka. Kelompok terakhir ini meliputi para prajurit dan pengawal istana, sahabat dekat, para *mawālī*, dan pembantu.¹⁹

Praktik perbudakan tensinya cukup tinggi saat itu. Ini tampak pada jumlah budak yang dimiliki oleh keluarga istana. Dirwayatkan bahwa istana al-Muqtadir (908-932 M) memiliki 11 ribu laki-laki Yunani dan Sudan yang sudah dikebiri. Pada kesempatan yang lain diceritakan bahwa al-Mutawakkil pernah menerima hadiah dari salah satu jenderal yang sebanyak seratus budak.²⁰

Kelas petani, yang membentuk mayoritas penduduk dan merupakan sumber pemasukan utama kerajaan, terdiri atas penduduk asli setempat, yang dimasukkan ke dalam kelompok *zimmī*. Orang Arab menganggap dirinya terlalu mulia untuk terjun

¹⁷ Hitti, *History of the Arab*, h. 414.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, h. 426.

²⁰ *Ibid.*, h. 428.

dalam aktivitas pertanian. Al-Jabbār menggambarkan bahwa baik di desa maupun di kota, orang-orang *zimmī* sangat kuat berpegang teguh pada budaya dan memelihara bahasa asli mereka.

Perbedaan kelas sosial ini semakin kentara pada zaman al- Mutawakkil yang memberlakukan aturan sangat keras bagi kaum *zimmī*, terutama bagi umat Kristen dan Yahudi yang harus menempelkan simbol setan dari kayu di rumah mereka, meratakan dengan tanah kuburan mereka, harus mengenakan busana berwarna kuning, membuat tambalan warna kuning pada busana budak mereka, dan hanya boleh menunggang keledai berpelana kayu yang ditandai dengan bola berbentuk delima di belakangnya.²¹ Hal yang lebih memilukan adalah kesaksian mereka yang memberatkan umat Islam tidak diterima. Alasannya, orang Yahudi dan Kristen dipandang telah mencederai kitab suci mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi dipercaya. Namun demikian, orang Kristen pada era Abbasiyah pada umumnya menikmati kebebasan beragama relatif besar.

D. Kondisi Pranata Sosial di Era Dinasti Abbasiyah

1. Pranata Sosial bidang Pendidikan

Kehidupan intelektual di era Dinasti besar ini diawali dengan berkembangnya perhatian pada perumusan dan penjelasan panduan keagamaan terutama dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dari kedua sumber ini kemudian muncullah berbagai keilmuan lainnya. Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Hadis adalah dua rangkaian seri pengetahuan yang menjadi fokus dan pokok perhatian waktu itu. Perhatian itu dapat dilihat dengan banyaknya kitab yang ditulis untuk menjelaskan Al-Qur'an dan Hadis. Gambaran ini merupakan bukti bahwa Dinasti Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah.

Sekolah dasar pada periode Abbasiyah biasanya merupakan bagian yang terpadu dengan masjid. Kurikulum utama dipusatkan pada Al-Qur'an sebagai bacaan siswa selain mereka diajarkan juga baca-tulis. Seiring dengan belajar baca-tulis, siswa juga mempelajari tata bahasa Arab, kisah-kisah para nabi, dasar-dasar

²¹ *Ibid.*, h. 442.

aritmatika, dan puisi dengan syarat tidak bersifat erotis. Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah metode menghafal. Kesempatan belajar pada tingkat sekolah dasar tidak hanya dapat dirasakan oleh anak-anak laki-laki, tetapi kesempatan yang sama juga dirasakan oleh anak-anak perempuan, meski kemudian mereka tidak dapat menempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi. Alasan utamanya, boleh jadi, karena menganggap dunia pendidikan bukan kebutuhan utama bagi anak perempuan.²² Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam pertama untuk pengajaran yang lebih tinggi tingkatannya adalah Bait al-Ḥikmah, didirikan oleh al-Ma'mūn di Baghdad. Selain berfungsi sebagai biro penerjemahan, lembaga tersebut dikenal juga sebagai pusat kajian akademik dan perpustakaan umum, dan memiliki sebuah observatorium.

Lembaga-lembaga keilmuan seperti perpustakaan dan akademi banyak bermunculan. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas, karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana orang juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan dapat diraih paling tidak dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, di antaranya, terjadinya akulturasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Akulturasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, sastra, serta karya-karya dari Persia juga diterjemahkan. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi; sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat.

Babak penerjemahan yang segera diikuti oleh babak aktivitas kreatif yang diekspresikan oleh orang muslim tidak hanya

²² *Ibid.*, h. 513.

membaurkan kebijakan kuno Persia dan klasik Yunani dalam hal pembangunan budaya; tapi juga mengadaptasikan keduanya sesuai dengan pranata sosial dan pola pikir mereka.²³ Penerjemahan dan alih bahasa karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan Dinasti Umayyah. Namun, ketika kekuasaan beralih ke Dinasti Abbasiyah, aktivitas penerjemahan semakin marak. Khalifah Al-Manṣūr banyak mendatangkan ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad, di samping juga mengirimkan utusan untuk mencari buku-buku ilmiah dari negeri Romawi dan mengalihkannya ke dalam bahasa Arab.²⁴

Banyak intelektual dan ilmuwan yang lahir dari rahim Dinasti Islam ini. Dalam bidang ilmu kedokteran, nama Ḥunain ibn Ishāq (w. 873) dengan karya monumentalnya *‘Asyr al-Maḡālāt fī al-‘Ain* (sepuluh risalah tentang mata), Jibril ibn Bakhtasi (w. 830) dengan karya tulisnya *Manāfi ‘ al-Ḥayawān*, sekaligus juga merupakan dokter pribadi Khalifah Hārūn ar-Rasyīd, al-Ma’mūn, dan keluarga Barmak. ‘Ali ibn Sahl Rabbān al-Jabbār, yang hidup pada pertengahan abad IX (awalnya seorang Kristen dari Tabaristan yang masuk Islam pada masa al-Mutawakkil) menulis buku *Firdaus al-Ḥikmah* (Surga hikmah), salah satu kompendium obat-obatan tertua dalam literatur bahasa Arab.

Gerakan penejemahan terus berlanjut hingga akhir pemerintahan Khalifah Hārūn ar-Rasyīd dan pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma’mūn muncul perbendaharaan ilmu pengetahuan yang sangat signifikan melalui hasil peninggalan Yunani. Di samping buku-buku Yunani yang dibawa ke *Bait al-Ḥikmah* dari Ankara, dan Amuriyah, terdapat juga buku-buku lain yang dibawa dari Cyprus. Penulis terkenal zaman Khalifah al-Ma’mūn di antaranya adalah Sahl ibn Hārūn yang banyak menulis dan menerjemahkan buku-buku karangan para ahli filsafah dari negeri Cyprus.

M. Abdul Karim mencatat bahwa pada masa Hārūn ar-Rasyīd, kekayaan negara yang banyak, sebagian besarnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti mendirikan rumah sakit, membiayai pendidikan kedokteran dan farmasi, dan

²³ *Ibid.*, h. 454.

²⁴ Tim Penyusun Dār al-‘Ilm, *Atlas Sejarah Islam, Sejak Masa Permulaan hingga Kejayaan Islam* (Jakarta: Kaysa Media, 2011), h. 89.

sebagainya. Sementara pada era al-Ma'mūn, kekayaan itu digunakan untuk menggaji para penerjemah dari golongan Kristen, Ṣābi'īn, dan bahkan penyembah binatang untuk menerjemahkan berbagai buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab, serta mendirikan Bait al-Ḥikmah sebagai pusat penerjemahan dan akademi yang dilengkapi dengan perpustakaan.²⁵

Badri Yatim menyatakan bahwa aktivitas penerjemahan saat Abbasiyah bertahta terjadi dalam tiga fase: (1) Masa Khalifah al-Manṣūr hingga Khalifah Ḥārūn ar-Rasyīd. Karya-karya yang diterjemahkan pada fase ini mayoritas berhubungan dengan ilmu astronomi dan ilmu mantiq. (2) Masa Khalifah al-Ma'mūn hingga tahun 300 H. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat. (3) Fase setelah tahun 300 H, terutama setelah adanya pembuatan kertas, banyak diterjemahkan buku-buku tentang ilmu kedokteran.²⁶

Ahmad Syalabi mencatat bahwa ada dua hal penting yang perlu dicatat bahwa *pertama*, kaum muslim bukan saja sebagai penerjemah, tetapi juga pencipta dan pembuat pembaruan di dalam topik-topik yang dipindahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka telah menguraikan keterangan-keterangan dan ulasan-ulasan yang sangat bernilai serta besar artinya. *Kedua*, kaum muslim telah memainkan peranan penting dalam menyumbangkan bakti kepada kebudayaan dunia.²⁷

Perlu dicatat pula, pada era kekuasaan Abbasiyah, perkembangan pendidikan dan pengajaran sangat pesat dan merata di seluruh pelosok negeri taklukannya. Madrasah dibangun tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di desa-desa terpencil. Anak-anak dan orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan dan melawat ke pusat-pusat pendidikan dengan meninggalkan kampung halamannya.²⁸ Perkembangan dunia pendidikan yang cukup signifikan ini mengantarkan umat Islam kepada fase kejayaan peradaban yang mengejutkan dunia lain.

²⁵ Karim. *Sejarah Pemikiran*, h. 181.

²⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 56.

²⁷ A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, jilid. III, terj. Muhammad Labib Ahmad (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru. 2003), h. 173.

²⁸ Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 174.

2. Pranata Sosial bidang Pertanian

Pranata sosial bidang pertanian di era ini maju pesat pada awal pemerintahannya. Hal ini disebabkan posisi pusat pemerintahan Abbasiyah sendiri berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang biasa dikenal dengan nama *sawād*. Pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun kembali secara bertahap. Irigasi lama dari aliran sungai Eufрат dihubungkan dengan saluran irigasi baru sehingga membentuk sebuah “jaringan yang sempurna”. Kanal besar pertama, yang disebut *Nahr ‘Tsā* setelah digali kembali oleh keluarga al-Manṣūr, menghubungkan aliran sungai di Anbar sebelah barat laut dengan sungai Tigris di Baghdad. Kanal kedua adalah *Nahr al-Mālik* yang tersambung ke Sungai Tigris di bawah al-Madāin.²⁹

Tanaman asli di Irak terdiri dari gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Daerah yang paling subur adalah di dataran tepian sungai ke selatan, *sawād*, yang menumbuhkan berbagai jenis buah-buahan dan sayuran, yang tumbuh di daerah panas maupun dingin. Kacang, jeruk, terung, tebu dan beragam bunga seperti mawar dan violet tumbuh dengan subur. Hasil pertanian yang melimpah seperti ini menjadi salah satu sumber pendapatan kerajaan yang terbesar. Ya‘qūbi sebagaimana kutip Philip K. Hitti mengilustrasikan bahwa secara politik daerah pertanian didiami oleh orang-orang Transoxiana dan Sijistan yang memiliki sumber daya manusia yang baik.³⁰ Karena itu, tidak mengherankan kalau daerah itu dikenal pada zaman al-Ma‘mūn sebagai “kerajaan yang utuh”.

3. Pranata Sosial bidang Perdagangan dan Industri

Sementara itu, pranata sosial yang berhubungan dengan perdagangan dan industri pada awalnya dipegang oleh orang Yahudi, Kristen, dan Zoroaster, namun belakangan digantikan oleh

²⁹ Marshal Hodgson, *The Venture of Islam*, terj. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Paramadina. 2002), h. 124.

³⁰ Hitti, *History of the Arab*, h. 436.

orang-orang Arab yang lebih suka berdagang daripada bertani.³¹ Harus diakui, kekuasaan kerajaan yang sangat luas dan tingkat peradaban yang tinggi itu dicapai dengan melibatkan jaringan perdagangan internasional yang luas. Pelabuhan-pelabuhan seperti Baghdad, Basrah, Sairaf, Kairo, dan Iskandariyah segera berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan darat dan laut yang aktif. Para pedagang muslim telah mampu merambah sampai ke belahan dunia Timur, yakni Cina yang dilakukan sejak masa Khalifah kedua Abbasiyah, al-Manşūr, sedangkan di sebelah barat pedagang muslim telah mencapai negeri Maroko dan Spanyol. Semua capaian tersebut karena didukung oleh pengembangan industri rumah tangga dan pertanian yang maju. Industri kerajinan tangan menjamur di berbagai pelosok kerajaan. Daerah Asia Barat menjadi pusat industri karpet, sutra, kapas dan kain wol, satin, dan brokat, sofa dan sarung bantal, juga perlengkapan dapur dan rumah tangga lainnya.

Namun, pengaruh dari pertumbuhan perdagangan yang pesat menyebabkan para pedagang mendapat banyak keuntungan dan mulai menguasai tanah yang luas serta menjadikannya sebagai lahan investasi. Hal ini menyebabkan munculnya kepemilikan pertanian yang besar. Sebaliknya, para petani kecil terhimpit beban pajak yang sedemikian rupa sehingga hal ini mendorong mereka mencari sarana guna menghindarkan diri, yaitu sarana yang disebut dengan *iljā'*, yakni seorang petani mencatatkan tanahnya di Departemen Perpajakan atas nama figur yang berpengaruh, dan menyerahkan sebagian penghasilannya sebagai imbalan atas perlindungannya.³² Modus ini terus berlanjut hingga akhirnya para petani ini merugi dan sebagian tanah mereka disita oleh pihak yang menjadi tempat perlindungannya dan mereka berubah menjadi petani penggarap saja.

4. Pranata Sosial bidang Politik

Pembagian wilayah ke dalam provinsi yang dipimpin oleh seorang amīr (gubernur) di zaman Dinasti Abbasiyah selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Begitu pun klasifikasi

³¹ *Ibid.*, h. 429.

³² Adonis, *Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam*. jilid. 2, terj. Khairon Nahdhiyin (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 94.

politik tidak selalu terkait dengan klasifikasi geografis. Konsekuensi dari wilayah kekuasaan yang sangat luas dan sarana komunikasi yang sangat sulit masa itu mengharuskan sistem desentralisasi menjadi pilihan bagi para Khalifah Abbasiyah.

Khalifah berperan sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi, sekaligus menguasai jabatan keagamaan dan pemimpin sakral. Di bawah khalifah ada lembaga *wizārah* yang bertugas sesuai dengan aturan yang digariskan oleh hukum Islam untuk mengangkat dan menurunkan para pegawai. *Wazīr* adalah pelaksana non-militer yang diserahkan oleh Khalifah kepadanya.

Setidaknya, ada dua model ke-*wazīr-an* pada era Abbasiyah. Pertama, *tafwīd*, yakni *wazīr* yang memiliki kekuasaan sangat tinggi dan dapat bertindak tanpa restu dari khalifah, termasuk mengangkat dan memecat gubernur dan hakim tetapi tidak dapat memecat pegawai yang diangkat oleh Khalifah. Kedua, *tanfīd*, yaitu *wazīr* yang memiliki kekuasaan terbatas, tidak berkuasa penuh, dan hanya mentaati perintah Khalifah saja.³³ Di samping itu, terdapat dua jabatan penting, yaitu pertama *ḥājib*; perantara antara rakyat dan khalifah; dan kedua *jallād*; algojo pelaksana hukuman termasuk hukuman mati.

Otoritas gubernur dalam menangani isu-isu lokal cenderung sangat dominan dan jabatannya bisa diwariskan.³⁴ Walaupun secara teoretis ia memegang jabatan itu selama disenangi oleh *wazīr*, yang merekomendasikan pengangkatannya adalah Khalifah, dan ia akan diturunkan dari jabatannya jika *wazīr* itu diganti.

Al-Māwardī, seperti dikutip oleh Philip K. Hitti, membedakan jabatan gubernur ke dalam dua jenis: Pertama, *imārah ‘āmmah* (keemiran umum) yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur urusan militer, mengangkat, dan mengawasi hakim pengadilan, memungut pajak, memelihara ketertiban, menjaga mazhab resmi negara dari segala bentuk penyimpangan, menata administrasi kepolisian, dan menjadi imam pada salat Jumat. Kedua, *imārah khaṣṣāh* (keemiran khusus) yang memiliki otoritas khusus dan tidak mengurus peradilan dan perpajakan.³⁵

³³ Karim, *Sejarah Pemikiran*, h. 168.

³⁴ Hitti, *History of the Arab*, h. 412.

³⁵ *Ibid.*

Corak pemerintahan mengalami perubahan drastis sejak Khalifah al-Manṣūr naik tahta. Gelar *khalīfatullāh* (wakil Allah) menunjukkan bahwa sang khalifah bukanlah menggantikan posisi Khalifah sebelumnya, tetapi dia merupakan wakil Tuhan di atas bumi. Karenanya, seorang khalifah tidak membutuhkan pengakuan dan sumpah setia rakyat sebagai legitimasi kekuasaannya.³⁶

Kalau pada masa Umayyah ada lima kementerian atau jawatan pokok, disebut *dīwān*. Semasa Abbasiyah, mereka menambah jumlah *dīwān*. Di antara yang terkenal adalah sebagai berikut: (1). *Dīwān al-Jund* (Pertahanan dan Keamanan), (2). *Dīwān al-Kharrāj* (Perpajakan), (3). *Dīwān ar-Rasā'il* (Surat-Menyurat), (4). *Dīwān al-Khatam* (Stempel), dan (5) *Dīwān al-Barīd* (Pos). Kelima *dīwān* ini terdapat di zaman Umayyah.

Sementara itu, tambahan *dīwān* di zaman Abbasiyah di antaranya: (1) *Dīwān al-Azīmah* (Urusan Krisis), (2). *Dīwān an-Nazr fī al-Mazālim* (Penanganan Tindak Kezaliman), (3). *Dīwān an-Nafaqāt* (Urusan Bantuan Sosial), (4). *Dīwān aṣ-Ṣawāfi* (?) (5). *Dīwān ad-Diyāt* (Denda), (6) *Dīwān as-Sirr* (Intelejen), (7). *Dīwān al-‘Arḍ* (?), dan (8) *Dīwān at-Tauqī‘* (Legalisir).³⁷ Di samping itu, ada juga *Dīwān asy-Syūrṭah* (Kepolisian) yang berbeda dengan era Umayyah. Kepala jawatan kepolisian disebut *Ṣāhib asy-Syūrṭah* yang bertugas menurut kondisi wilayahnya dengan tugas utama menjamin dan memelihara keamanan, harta, dan nyawa masyarakat.³⁸

5. Pranata Sosial bidang Militer

Selama pemerintahan Dinasti Abbasiyah, unsur Arab kehilangan peran dalam kemiliteran, seperti halnya dalam percaturan politik. Pada era awal pemerintahan Dinasti ini, pasukan pengawal istana, yang menjadi mesin militer terkuat kebanyakan diambil dari pasukan Khurasan.³⁹ Hal ini dilakukan oleh khalifah karena penduduk Khurasan sangat berjasa dalam meruntuhkan Dinasti Umayyah dan memiliki andil besar dalam membangun Dinasti Abbasiyah.⁴⁰ Pasukan reguler terdiri atas pasukan infanteri

³⁶ Karim, *Sejarah Pemikiran dan*, h. 180.

³⁷ *Ibid.*, h. 168.

³⁸ *Ibid.*, h. 169,

³⁹ S.A.Q. Hussaini, *Arab Administration* (Madras: Soldent & Co, 1949), h. 249.

⁴⁰ Tim, *Atlas Sejarah Islam*, h. 92.

(*ḥarbiyyah*) yang bersenjatakan tombak, pedang dan perisai; pasukan kavaleri (*fursān*) yang mengenakan pelindung kepala dan dada, serta bersenjatakan tombak panjang dan kapak; dan pasukan pemanah (*rummāh* atau *rāmiyyah*) yang bersenjatakan busur dan panah. Selain itu, pasukan pengawal khalifah (*ḥurrās*) mungkin merupakan satu-satunya pasukan tetap yang masing-masing mengepalai sekelompok pasukan.

Di samping pasukan tetap yang bertugas aktif disebut *murtaziqah* (pasukan bayaran), juga ada pasukan sukarelawan yang direkrut dari orang Badui, petani dan orang kota yang hanya menerima upah ketika bertugas, disebut *mutaṭawwi‘ah*. Hussaini, masih dalam buku *Arab Administration*, mengungkapkan bahwa khalifah memiliki 135 ribu pasukan tetap dan sejumlah besar pasukan sukarelawan yang siap diterjunkan dalam perang suci melawan musuh.⁴¹

Susunan sistem kemiliteran pada zaman al-Ma'mūn, al-Musta'īn dan khalifah-khalifah Abbasiyah lainnya, setiap 10 prajurit berada di bawah komando seorang *‘arif* (setara dengan *decurion* dalam kemiliteran Romawi kuno), setiap 50 prajurit berada di bawah komando seorang khalifah, setiap 100 prajurit dikomandoi oleh seorang *qā'id* (setara dengan *centurion*), dan untuk pasukan sebesar 10.000 orang terdiri atas 10 batalion, dikepalai oleh seorang *amīr* (jenderal). Pasukan sebesar 100 orang membentuk sebuah skuadron, dan beberapa skuadron membentuk sebuah unit.⁴²

Mengenai kesejahteraan prajurit di era Dinasti Abbasiyah sangat beragam tergantung posisi pasukan dalam dinas kemiliteran. Pasukan pengawal istana menempati peringkat tertinggi dalam menerima gaji, selanjutnya diikuti oleh pasukan kavaleri dan setelahnya pasukan infanteri. Pada masa al-Ma'mūn, ketika kerajaan mencapai puncak kejayaan, pasukan Irak dirikan berjumlah 125 ribu, pasukan infanteri menerima 240 dirham per tahun, sementara pasukan kavaleri menerima dua kali lipat dari itu.⁴³

⁴¹ Hussaini, *Arab Administration*, h. 265.

⁴² Hitti, *History of the Arab*, h. 409.

⁴³ *Ibid.*, h. 408.

E. Penutup

Dinasti Abbasiyah dengan imperium besarnya telah memberikan kontribusi yang tiada tara kepada generasi dunia kekinian. Bukan saja dalam hal pranata sosial, metode pengelolaan negara, dan pengaturan sistem kemasyarakatan, tetapi juga sumbangan ilmu pengetahuan dalam berbagai lini kehidupan. Karya dan tokoh-tokohnya telah menjadi inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lingkungan intelektual yang kondusif dan motivasi untuk mencari ilmu dari tatanan sosial yang mapan memberikan ruang gerak yang leluasa kepada pencari ilmu untuk mengembangkan pemikirannya demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Dinasti Abbasiyah telah menunjukkan dirinya kepada dunia bahwa pranata sosial yang dibangunnya sejalan dengan tuntunan ajaran Islam dan dengannya sukses mendulang kesejahteraan yang tidak saja dirasakan oleh kaum muslim, namun juga (diakui atau tidak) oleh golongan non-muslim. Ini terbukti mereka bisa hidup berdampingan dengan damai bersama umat Islam. Malah, pada era tertentu mereka diberi kesempatan dalam *trah* atas dengan menjadi pegawai pemerintah; bahkan ada yang menduduki jabatan strategis seperti di sektor keuangan dan posisi sebagai gubernur. Peran perempuan pun sangat signifikan dalam hubungannya dengan kemajuan negaranya; tidak mempersoalkan apakah ia seorang keturunan Arab atau *'ajam* (non-Arab).

'Ibrah dari mempelajari sejarah adalah agar kita mampu memperbaiki masa sekarang; dan pada saat yang sama kita pun mampu mempersiapkan masa yang akan datang yang lebih cerah. Karena akan sia-sia bila kita belajar sejarah tetapi tidak adapat mengambil pelajaran yang berharga darinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonis, *Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam*, Jilid II, terj. Khairon Nahdhiyin, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ansary, Tamin, *Destiny Disrupted, A History of The World Through Islamic Eyes*, terj. Yuliani Liputo. Jakarta: Zaman, 2010.
- Armstrong, Karen, *Islam a Short History*, terj. Ahmad Mustofa. Yogyakarta: El-Banin Media, 2008.
- Hitti, Philip K., *History of the Arabs: from the Earliest Times to the Present*. terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Horton, Paul B. and Hunt, Chester, L. *Sosiologi*, jilid. I, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Hussaini, S.A.Q. *Arab Administration*. Madras: Soldent & Co, 1949.
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jilid I, cet. ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mansur. *Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Maqdisi, George, *The Venture of Islam*, terj. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Soemardjan, Selo, dan Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yasbit FE UI, 1986
- Sourdell, D., "The Abbasid Caliphate" dalam *The Cambridge History of Islam*, Vol. 2, New York: Cambridge University Press, 1970.

- Sumarsono dan Ahmad Fuad Zain, *Pendidikan sebagai Pranata Sosial*, <http://www.scribd.com/doc/39638126>. (Diakses 14 Oktober 2011).
- Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syalabi, A., *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jilid III, terj. Muhammad Labib Ahmad. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003.
- Tim Penyusun Dār al-‘Ilm, *Atlas Sejarah Islam, Sejak Masa Permulaan hingga Kejayaan Islam*, Jakarta: Kaysa Media, 2011.
- Toynbee, Arnold, *Sejarah Umat Manusia: Uraian Analitis, Kronologis, Narasi, dan Komparati*, terj. Agung Prihantoro, dkk., cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.